

**DAKWAH MANIFESTO MASYARAKAT MADANI PARTAI POLITIK;
STUDI KASUS PARTAI GERINDRA**

Abu Khaer

PTIQ - Jakarta

email: abukhaer@yahoo.com

Hp: 08990-564-699

ABSTRACT

Trend strong and weakening private realm, public, state and economic for demokration can cause imbalance in the politic of the state. Finding author, borrow case political party of Gerindra, that Gerindra have given contribution for shape civilization Indonetion in cauldron political of praktic in this indonestion republic. Political party in Indonestion have pass proces demokration adult in reach of civil socity. Paradigm of politic in Indonetion can't separated from factor supervision an balances in all domains civil socity, It is good, pिरivate, public, economic, as well as state. The conclusion different with paradigm of politic pundit for example : Antonio Gramsci (1999) and Alexis de Tocqueville (1945) that contend socity movement must be outside and confront with state.

Kecenderungan menguat dan melemahnya ranah privat, publik, negara, dan ekonomi bagi demokratisasi dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam politik suatu negara. Temuan penulis, meminjam kasus Partai Politik Gerindra, bahwa Gerindra telah bersumbangsih untuk membentuk peradaban Indonesia dalam kancah politik praktisnya di Republik Indonesia ini. Partai politik di Indonesia sudah melewati proses pendewasaan demokratisasi dalam rangka mencapai masyarakat yang madani. Paradigma politik di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari faktor pengawasan dan keseimbangan (check and balances) di semua ranah masyarakat madani, baik itu privat, publik, ekonomi (pasar), maupun negara. Kesimpulan tersebut berbeda dengan paradigma politik

ceudekiawan seperti Antonio Gramsci (1999) dan Alexis de Tocqueville (1945), yang berpendapat bahwa gerakan masyarakat madani harus berada di luar dan berhadap-hadapan dengan negara.

Keyword : Masyarakat Madani, partai politik, privat, publik, negara, pasar.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi paradigma dakwah politik *civil society* kaum Hegelian dan Marxis seperti de Tocqueville (Alexis de Tocqueville, 1945: t.h) dan Gramsci. Mereka menolak pandangan bahwa lembaga politik akan mampu membangun demokrasi bersama-sama dengan unsur masyarakat madani yang lain. Paradigma dakwah *civil society* Max Weber,(Ivan Doherty, 2001: 25) EE. Schattscheider,(SC. Stokes, 1999: 243-267) Thomas Janoski,(Thomas Janoski, 1998: 12-17) Andi Faisal Bakti dan cendekiawan masyarakat madani Indonesia mengkritisi kekakuan pandangan pertama. Menurut paradigma yang disebut terakhir berargumentasi bahwa apapun bentuk dari suatu perkumpulan masyarakat yang berkembang, tak terkecuali partai politik, bisa bekerja sama dengan Negara untuk membentuk suatu masyarakat *civil society* (masyarakat madani) yang demokratis (Azyumardi Azra, 2003: 75).

Dengan memfokuskan kajian pada manifesto perjuangan partai politik Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), penulis mendukung dan memperkuat pendapat cendekiawan masyarakat madani dan berupaya untuk menemukan rancang-bangun demokrasi (M. Steven Fish , 2002 : 4-5) untuk membentuk masyarakat madani (*civil society*) oleh suatu aktor partai politik.

Terlepas dari asumsi pendapat cendekiawan yang mendukung maupun kontra, mengenai hubungan antara partai politik dan masyarakat madani, penulis mendasarkan argumennya pada studi yang dilakukan oleh beberapa cendekiawan di proses demokratisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendukung bahwa partai politik

merupakan bagian dari aktor *civil society*. Menariknya, temuan sementara penulis, mensyaratkan bahwa manifesto politik partai Gerindra mendukung ide-ide demokrasi dan aplikasinya bertujuan agar terbentuk masyarakat madani di Indonesia. Namun ada beberapa variabel yang diduga menjadi kendala tumbuhnya budaya demokrasi di kalangan Gerindra sebagai syarat utama bangunan masyarakat madani, yaitu atribut Gerindra sebagai partai politik dan sosok militer Prabowo Subianto sebagai Dewan Pembina Gerindra. Menurut penulis, variabel tersebut masih debatable. Berdasarkan penelitian penulis, sosok Prabowo dalam platform dan aksinya sudah mencerminkan pilar-pilar masyarakat madani.

PARTAI POLITIK DALAM WACANA MASYARAKAT MADANI

Alexis de Tocqueville dalam bukunya *Democracy in America*, berpendapat bahwa demokrasi ala Amerika Serikat dengan sistem kepartaiannya, pada hakikatnya merupakan sebuah sistem yang memberi peluang kepada mayoritas untuk bertindak semaunya, semacam diktator mayoritas ketimbang demokrasi. De Tocqueville lebih lanjut memaparkan, jika seseorang atau suatu partai politik atau organisasi masyarakat termasuk dalam kelompok minoritas, ia tidak akan mendapatkan apa-apa, karena semuanya telah ditentukan oleh kelompok mayoritas yang menentukan pemilihan umum. (Alexis de Tocqueville, t.t : 264-280)

Kelompok mayoritas, melalui kemenangan pemilihan umum, menyisihkan untuk dirinya semua hak menentukan kebijakan politik, melalui institusi kepresidenan yang amat kuat. Dalam hal ini, partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskan 'nafsu birahi' kekuasaannya sendiri. (Vahid Amani Zoeram, dkk, t.t : 223-224) Partai politik hanya berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu '*at the expense of the general will.*' Dalam bahasa Gramsci, telah terjadi hegemoni yang dilakukan bukan saja oleh kelas

penguasa, ia juga bisa diberlakukan oleh kelompok-kelompok sosial, apapun bentuknya tak terkecuali partai politik, apakah mereka yang berhaluan progresif, regresif, reformis, dan sebagainya demi meraih kekuasaan untuk memimpin, bagaimana mereka memperluas kekuasaan mereka dan mempertahankannya. (<http://links.org.au/node/1260>)

Gerindra -sebagai salah satu bagian dari kontestan partai politik di pemilu- dalam pendapat Whitehead, sebagaimana yang dikutip oleh Hadiwinata termasuk dalam kategori *political society* (masyarakat politik) bukan *civil society* (masyarakat madani). (Bob Sugeng Hadiwinata, 2005 : 8) Kategori yang disebut pertama, berambisi untuk memperebutkan kekuasaan politik melalui berbagai cara, sedangkan kategori yang disebut kemudian, hanya berpretensi untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah tanpa harus ikut memperebutkan kekuasaan.

Sir Azra dan Andi Faisal Bakti menguraikan lebih lanjut bahwa pandangan Whitehead senada-seirama dengan pernyataan para cendekiawan Hegelian dan Marxis seperti Ernest Gellner, Hannah Arendt, Jurgen Habermas, David Ost, Andre Arato, Fernando Cardoso. (Azyumardi Azra, 2003 : 75) Di Indonesia, pandangan ini diwakili oleh Muhammad Hikam AS, mantan Menristek era Presiden Abdurrahman Wahid. Mereka berpandangan bahwa secara keseluruhan tatanan politik terdiri atas Negara di satu pihak *vis a vis civil society* di pihak lain. Ide *civil society* merupakan ide sebagian masyarakat yang memiliki kehidupan sendiri yang jauh berbeda dengan negara, dan yang sebagian besar memiliki otonomi sendiri. *Civil society* terletak di luar batas keluarga, klan dan kewilayahan. Dalam artian ini *civil society* terpisah dari negara. (Azyumardi Azra, 2003 : 76)

Namun demikian, keberadaan partai politik (parpol) juga merupakan salah satu komponen dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Max Weber, sebagaimana dikutip oleh Ivan Doherty, menyatakan bahwa *political parties as 'children democracy,'* partai politik adalah 'anak kandung' demokrasi. Bahkan EE. Schattscheider berpendapat bahwa keberadaan partai politiklah yang sebetulnya

menentukan demokrasi, *Political parties created democracy*, dan *modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*, demokrasi modern tak mungkin terjaga kecuali dalam terma kepartaian. (Ivan Doherty, 2001: 25)

Thomas Janoski berpendapat bahwa partai politik itu merupakan agen penghubung antara masyarakat dengan negara. Partai politik dengan demikian merupakan bagian dari gerakan masyarakat madani. Janoski lebih lanjut memformulasikan bahwa masyarakat madani itu memiliki empat ruang (*sphere*) domain, yaitu *private*, *public*, *state*, dan *market*. Keempat hal itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam peran masyarakat madani sebagai *check and balance* terhadap kekuasaan dan hegemoni suatu pemerintahan. (Thomas Janoski, t.t : 13)

Karena itu, Jimly Asshiddiqie memperkuat pendapat di atas dengan pernyataannya bahwa keberadaan suatu partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan sebagai suatu organisasi, keberadaan parpol bertujuan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah dan damai. Ia tidak hanya sebagai instrumen demokrasi tapi sekaligus mengusung tujuan yang lebih luas yakni memastikan kedaulatan rakyat atas hak-hak dasarnya, baik itu hak sipil politik maupun ekonomi dan sosial mereka.

Dalam konteks masyarakat madani di Indonesia, pandangan negatif terhadap peran partai politik di atas dikritik oleh Dawam Rahardjo dan Nurcholis Madjid. Menurut kedua cendekiawan pendukung pendapat ini *civil society* merupakan “mitra” Negara yang bisa mencegah birokrasi menyeleweng dari tugas dan hakekatnya yang sejati. Masyarakat sipil yang tergabung dalam beragam bentuk organisasi termasuk suatu partai politik bisa menjadi representasi dan kristalisasi kekuatan di luar negara, yang menjadi *sparing partner* bagi negara. Hal ini menjadikan *civil society* sebagai kekuatan

pengimbang sekaligus kontrol, yang membatasi dan memungkinkan negara tetap berjalan sesuai dengan hakekatnya. Dalam hal ini keterlibatan partai politik sebagai bagian dari *civil society* menjadi kekuatan yang efektif untuk mencegah hegemoni Negara. Selain itu, dengan masyarakat sipil menjadi indikasi ada wilayah-wilayah yang bisa digarap entitas mandiri di luar negara. Dengan demikian, segala energi, prakarsa, aktivitas dalam kehidupan masyarakat tidak terkonsentrasi dan tersentralisasi hanya pada negara semata-mata. (Azyumardi Azra, 2003 : 76)

Selain itu, Madjid cendekiawan pendiri Paramadina, meniscayakan *civil society* dipersyarat dengan adanya partai politik sebagai bagian *public sphere* atau ruang yang cukup yang di ruang tersebut warga masyarakat dapat dengan leluasa melakukan aktivitas sosial, politik dan ekonominya, tanpa didominasi oleh sekelompok kecil orang. (Nurcholish Madjid, 1999 : 145) Di dalam *public sphere* ini, warga masyarakat akan memiliki akses yang luas kepada lembaga-lembaga, baik lembaga negara seperti birokrasi, lembaga perwakilan dan peradilan, maupun lembaga non-negara seperti partai politik, lembaga keagamaan, gilda, perserikatan, federasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kelompok kepentingan lainnya. (Gordon Gauchat, 2012 : 170-171)

Di dalam *public sphere* itu pula terjadi diskursus yang intensif tentang segala hal yang terjadi dalam negara, sehingga pemerintah dan lembaga-lembaga negara memiliki tingkat akuntabilitas yang cukup tinggi. Di samping itu, kebijakan publik juga melibatkan masyarakat yang luas, melalui diskusi-diskusi publik yang intensif dilakukan. (Azyumardi Azra, 2003 : 384-385) Bahkan Azra berkesimpulan karena tidak mempunyai *public sphere* berupa partai politik-lah konsep-konsep masyarakat madani Cak Nur sendiri kurang begitu ‘membumi’ jika dibandingkan dengan Gus Dur, sebagai sesama pendekar masyarakat madani Indonesia. Oposisi yang dibangun oleh Cak Nur merupakan oposisi soliter. Menurut Gus Dur, demokratisasi harus dimulai dari perbedayaan politik rakyat. Dalam proses ini semua unsur masyarakat harus dilibatkan tanpa mengenal golongan manapun. Terpenting, masyarakat haruslah memulai untuk berdemokrasi dan inilah hakekat

dari sebuah demokratisasi. (Dirk Tomsa dan Andreas Ufen , 2013 : 125)

GERINDRA DALAM KANCAH POLITIK

Kiprah Abdurrahman Wahid dalam membumikan dan membangun masyarakat madani diikuti jejaknya oleh Prabowo Subianto, sang lokomotif dan komandan tertinggi partai politik Gerindra. Prabowo di samping berperan sebagai aktor oposisi birokrasi juga berperan dalam wadah partai politik. Dalam kedua kapasitasnya tersebut, Prabowo menurut *Gus Dur* merupakan sosok yang dianggap betul-betul perhatian ke rakyat. Prabowo sungguh-sungguh mengenal masalah ekonomi kerakyatan seperti pemberdayaan pertanian.

Apresiasi *Gus Dur* tersebut bukan merupakan sesuatu yang mengada-ada. Penguatan sektor ekonomi (*strong market/economy*) rakyat atau ekonomi kerakyatan merupakan salah satu pondasi dari tiga pondasi yang menopang bagi tegaknya masyarakat madani. Dua poin lainnya dari dasar pondasi, menurut Konprensi Dunia tentang *World Forum on Democracy* di Warsawa, Polandia, pada tanggal 24-27 Juni 2002 dan Azra adalah kuatnya Negara (*strong state*) dan kuatnya masyarakat sipil (*strong civil society*). (Azyumardi Azra, 2002 : 70)

Sementara itu, dalam nomenklatur Islam disaat membicarakan demokrasi dikenal beberapa prinsip yang merupakan bentuk dasar dari praktek yang dilakukan Rasulullah Saw. Dalam memimpin masyarakat seperti tertuang dalam Piagam Madinah, serta tercermin dalam pengangkatan para khulafa al-Rasyidin dan praktek kepemimpinan mereka. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: *shûrâ*, *musawa*, *'adâlah*, *amânah*, *mas'uliyah* dan *%urriyah*. (Abd al-\$amîd Ismaîl al-Ancaî, 1980 M/1400 H : 4-5) Firman Allah tentang *shûrâ*, sebagai mekanisme pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan bersama, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan terjabarkan dalam dalam surat Ali Imrân ayat 159 yaitu:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ

لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
 الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imran: 159).

Sistem demokrasi sendiri meskipun tak memiliki kebenaran yang absolut sebab terdapat beberapa kekurangan, akan tetapi memiliki nilai lebih dan beberapa keunggulan. Demokrasi telah terbukti mengantarkan pada terbentuknya suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menghasilkan kebijakan baik, masyarakat adil, berpihak kepada kepentingan mayoritas, menghargai kebebasan dan hak-hak individu. Qardhawī dan Madjid menyatakan bahwa demokrasi dapat membawa warga bangsa menuju terbentuknya *civil society* (masyarakat madani) yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebebasan, persamaan, toleransi, menghormati hak-hak individu dan musyawarah untuk kemaslahatan bersama. (Nurcholis Madjid, 2000 : 18-19)

Di Indonesia, bangunan masyarakat madani sampai tahun 2013 ini, proses transisi menuju demokrasi telah melalui masa 16 tahun sejak tahun 1998 masa keruntuhan rezim otoriter Presiden Suharto dan pemilu yang demokratis di tahun 1999. Era kepemimpinan BJ. Habibie sebagai Presiden RI ke-3 selama 1,4 tahun dan 2 bulan menjadi Wakil Presiden RI ke-7 membukan pandora gerakan demokrasi bangsa yang selama 32 tahun dikekang. (Azyumardi Azra, 2002 : 14-15) Pintu kebebasan dan demokrasi di Indonesia secara perlahan mulai terbuka.

Sejak Pemilihan Umum pasca reformasi sejak tahun 1999 sampai dengan Pemilihan Umum tahun 2009 telah banyak dinamika yang dihadapi dalam melaksanakan amanat demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Salah satu yang paling berbeda dibandingkan dengan penerapan sistem demokrasi otoriter pada masa rezim orde baru adalah dengan munculnya berbagai macam partai politik peserta pemilu yang setiap saat jumlahnya selalu bertambah. (Azyumardi Azra, 2002 : 60) Pada pemilu tahun 2009, partai politik peserta pemilu mencapai jumlah yang paling banyak dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, yaitu sebanyak 38 parpol ditambah 6 partai politik lokal di Nangroe Aceh Darussalam. Di Pemilu tahun 2014, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/ Tahun 2003 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik KPU Nomor: 5/BA/I/2003, sepuluh jumlah parpol yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu dari 34 jumlah partai yang telah diverifikasi KPU. Sepuluh partai tersebut secara berurut adalah: Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat (PD), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Golongan Karya (Golkar), Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasional-Demokrat (NasDem) dan Partai Persatuan Pembangunan. (KPU Nomor 05/Kpts/KPU/ Tahun 2003 dan KPU Nomor: 5/BA/I/2003)

Pada pemilu 2009 yang lalu, ada satu partai politik baru yang dianggap cukup fantastis mendulang sukses dalam kancah perpolitikan di Indonesia. (Saiful Mujani and R. William Liddle, 2010 : 36-38) Partai politik ini adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Didirikan oleh Prabowo Subianto, seorang militer mantan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI-AD di era Orde Baru. Meskipun ia disinyalir ikut bertanggung jawab atas kasus-kasus pelanggaran HAM berdalih subversif seperti penculikan dan penghilangan aktivis, sebagai mantan militer dan seorang pengusaha minyak yang *go internasional*, keluasan relasi dan kemampuan finansialnya ikut membantu mengembangkan dan mendulang suara dukungan rakyat Partai Gerindra dengan pesat. Bahkan, Prabowo, sebagai mantan militer yang secara *notabene* berlawanan dan dilawan oleh para aktivis *civil society*, dalam

berbagai bursa lembaga survey, merupakan salah-satu Calon Presiden yang diprediksi cukup tinggi mendapat suara dukungan rakyat untuk memimpin NKR-Indonesia ini. (LSI, 2012 : 16)

Pada pemilu pertamanya, partai politik Gerindra berhasil menduduki posisi ke-8 dengan meraup 4.5% suara dan mendapatkan 30 kursi di Senayan, gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Saiful Mujani and R. William Liddle, 2010 : 16) Namun, dengan belum terpilihnya mantan calon wakil presiden dari partai politik ini pada pemilu 2009, Prabowo, Partai Gerindra pun menjadi partai politik oposisi bersama PDI-P dan Hanura. Partai Gerindra adalah partai politik yang menggambarkan dirinya sebagai partai yang membela kaum marginal, kaum miskin, dan kaum pedesaan. Hal tersebut dapat dilihat dari visi Partai Gerindra untuk Indonesia berbunyi: “Menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Mencuatnya popularitas dan kepercayaan publik terhadap Partai Gerindra sesuai hasil survei yang dilakukan lembaga survey Indonesia (LSI), dinilai oleh Direktur Eksekutif Lingkaran Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap partai-partai politik yang menikmati kekuasaan yang tak kunjung menawarkan perubahan nyata. Masyarakat mulai tidak percaya dengan para politisi partai lama yang tidak bisa diandalkan. Alasan berikutnya, diakibatkan oleh slogan-slogan yang didicantumkan partai Gerindra cukup menyentuh perasaan publik.

Berdasarkan latar belakang di atas, Ilmu Sosial di Indonesia masih kurang dalam hal kajian dan analisa tentang peran partai politik dan elit politik dalam wacana masyarakat madani, sehingga kajian tentang perspektif peran parpol dan elite politik menjadi langka. Padahal persoalan yang bersifat politis dan elitis di masyarakat semakin banyak. Dengan mengetahui biografi wacana partai politik dan para elite politiknya, kita bisa membaca perilaku dan kerja elit dalam panggung politik. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk ikut

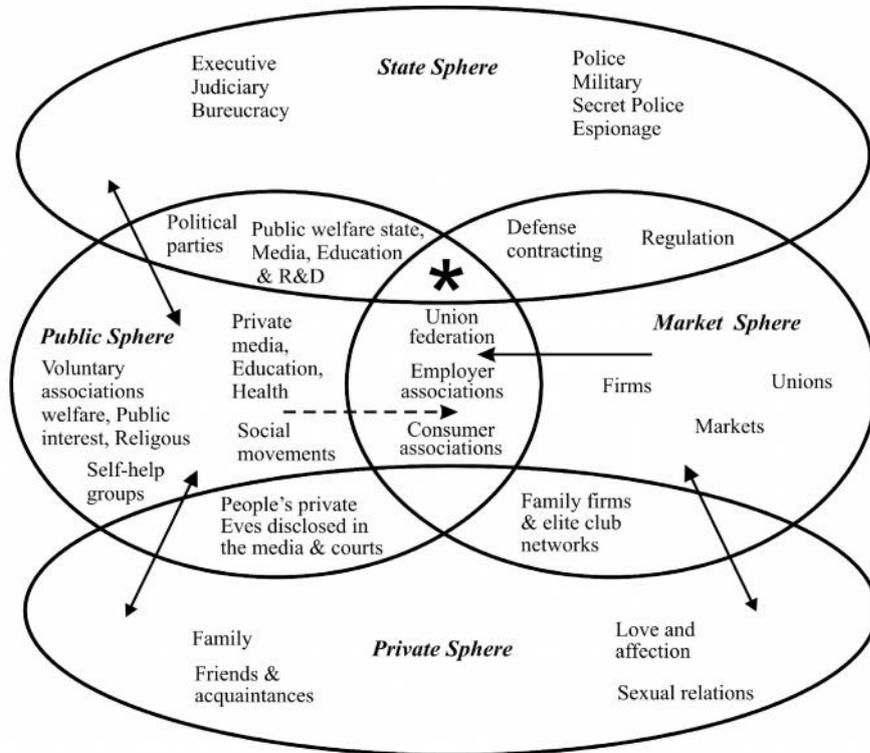
bersumbangsih dengan mengangkat tema penelitian disertasi dengan judul “Manifesto Masyarakat Madani Partai Politik Gerindra.”

Atas dasar pemikiran di atas, masalah penelitian dapat dirumuskan melalui pertanyaan besar bagaimanakah rancangan masyarakat madani yang dibentuk dalam manifesto partai Gerindra. Pernyataan tersebut diperinci lagi dalam rumusan minor: bagaimanakah manifesto masyarakat madani parpol Gerindra? Lebih jauh, apa upaya parpol Gerindra dalam membangun masyarakat madani dalam ranah *private*? Bagaimana pula hal tersebut teraplikasikan dalam ranah publik? Lalu seperti apakah potret perjuangan *civil society*-nya terbangun dalam *state sphere*? Terakhir, apa implikasinya dalam ranah *market sphere*?

Penelitian ini mencoba memahami pemikiran dan upaya yang dilakukan partai Gerindra untuk membangun masyarakat yang madani. Penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang sebisa mungkin menghindari subyektifitas dan mengedepankan obyektivitas. Pertama, menganalisis perdebatan akademik di seputar konsep *civil society*. Kedua, menganalisis perdebatan akademik bagaimana dunia Islam mengadopsi konsep *civil society* dalam konsep masyarakat madani. Ketiga, menjelaskan bagaimana partai politik Gerindra menerapkan konsep masyarakat madani dalam kiprahnya.

Konsep metodologi Masyarakat madani yang dipakai untuk menganalisis pembahasan ini menggunakan rancang-bangun masyarakat madani yang diformulasikan oleh Thomas Janoski sebagai mana yang telah disinggung di muka. (Andi Faisal Bakti, (2006 : 1) Janoski dalam formulanya merangkum dengan arif dimensi-dimensi kontradiktif corak protagonis dan antagonis paradigma masyarakat madani berhubungan dengan suatu pemerintahan. Skema kerangka formulasi tersebut sebagai berikut:

Introduction to Citizenship



* Public law corporations with tripartite control

Gambar: Tautan Ranah Publik dengan Tripartite Kontrol

KAWAH CANDRADIMUKA MANIFESTO MASYARAKAT MADANI GERINDRA: PRIVATE SPHERE

Partai Gerindra lahir untuk mengangkat rakyat dari jerat kemelaratan, akibat permainan orang-orang yang tidak peduli pada kesejahteraan. (DPP Partai Gerindra, 2009 : 3) Demokrasi sudah dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kapital besar. Akibatnya, rakyat hanya jadi alat. Bahkan, siapapun yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi dan politik akan dengan mudah jadi

korban. Untuk melawan secara konstitusional hegemoni tersebut, Gerindra terbentuk dari gabungan pribadi-pribadi dengan beraneka ragam latar belakang mulai dari kalangan petani, buruh, nelayan, aktivis sosial, akademisi, pengusaha, hingga militer. (Wawancara dengan Suhardi dan Permadi)

Prabowo Subianto, Muchdi PR., Mayjend Haryadi Darmawan, Kombes (Pur) Alfons Loe Mau, merupakan nama-nama dari kalangan militer yang ikut bergabung dengan Gerindra. Dalam ranah pengusaha, selain Prabowo juga tercatat ada Hasyim adik prabowo sendiri, seorang bisnismen dan kolektor benda-benda purbakala. Dikalangan aktivis, terdaftar nama-nama semisal Fadli Zon, Ahmad Muzani, Pius Lustrilanang, dan M. Zastrouw. Kalangan akademisi yang ikut gabung dalam Gerindra juga banyak, sebut saja misalnya Suhardi, ilmuwan pertanian; Burhanuddin Abdullah, praktisi keuangan. Dari kalangan artis terdapat Jamal Mirdad dan Rachel Maryam.

Gerindra dibentuk oleh gabungan pribadi-pribadi dengan semangat yang sama, yaitu meluruskan rel yang salah atas sikap para elite dalam memimpin negeri ini. Bagi mereka, pemerintahan hanya mengedepankan ekonomi yang kapitalistik, politik demokrasi liberal yang tidak sesuai *founding fathers* bangsa ini. Banyak sekali parpol-parpol yang lebih menguntungkan golongan saja daripada masyarakat secara keseluruhan. Semua elite sekarang ini, gagal untuk dijadikan pemimpin sehingga muncul partai-partai baru, tak lain untuk memunculkan figur pemimpin baru bagi pemerintahan ke depan. Berdasarkan hal tersebut, Gerindra ingin memperjuangkan pemimpin yang baru. Apalagi, sudah banyak dukungan selama ini, baik dari kelompok tani, pelayan, dan masyarakat yang merasa hanya menjadi korban globalisasi, tidak menerima manfaat apa-apa. Semua alat-alat strategis negara sekarang ini malah semakin banyak dikuasai asing. Gerindra menganggap ini tak lain proses dari pengkhianatan elite bangsa. (Prabowo Subianto, 2012 : 1)

PUBLIC SPHERE

Awal didirikannya Gerindra, tidak terlepas dari peran organisasi publik di bidang pertanian, yaitu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di mana selama dua periode Prabowo menjadi ketuanya. Selain HKTI, berbagai macam organisasi mendukung Gerindra, antara lain Lembaga Masyarakat Peduli Hutan, Kebun dan Pangan, Perbindo (Perhimpunan Bambu Indonesia) Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia (APPSI), Gerakan Muslim Indonesia Raya (Gemira), dan lain-lain. (Wawancara dengan Suhardi)

Berbagai lembaga publik itu bergabung dengan Gerindra karena merasa prihatin terhadap lingkungan rakyat kecil dan nasib petani yang selalu bernasib buntung sebagai dampak struktur ekonomi yang ada. Untuk memperbaikinya nasib petani harus didahului dengan perubahan sistem ekonomi. Tapi yang membuat mereka frustrasi saat ingin melakukan perubahan, sebab mereka sebagai organisasi publik terhempas oleh kekuatan politik. Intinya, politik adalah panglima, termasuk menentukan nasib petani. Apa yang digagas dan diusulkannya tak pernah ditanggapi. Sebagai contoh, mereka punya usul negara jangan impor pangan, ternyata malah impor. Dari situlah akhirnya mereka menyadari bahwa untuk melakukan perubahan sistem harus menggunakan kekuatan politik.

Gerindra pada pemilu lalu, hanya sebatas mengajukan Prabowo Subianto, sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati dari PDIP. Meski gagal dalam memperoleh suara mayoritas kala itu, namun Gerindra telah berhasil dalam menimba pengalaman, sebagai bekal dikemudian hari dalam mencalonkan Presiden dari partainya sendiri. Menjelang Pilpres 2014, Gerindra dengan penuh percaya diri akan mendukung Let Jen (Purn TNI) Prabowo Subianto, sebagai satu satunya calon Presiden dari partainya pada pemilu 2014 nanti. Bersama Prabowo, Partai Gerindra perlahan mulai bangkit, dengan meraih simpati dari seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum petani dan nelayan. Tiap detik, dari hari ke hari, jumlah anggota partai Gerindra dan simpatisan makin bertambah, bertambah dan terus bertambah. Hal ini membuktikan bahwa Gerindra semakin dipercaya sebagai Partai calon pemenang Pemilu 2014. (Wawancara dengan Suhardi)

STATE SPHERE

Gerindra dalam hubungannya dengan negara, berdiri tegas dengan menjadi partai oposisi yang jelas dan tegas selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan yang merugikan rakyat dan negara. Misalnya, keputusan Pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM.

Gerindra sadar bahwa naik atau turun harga BBM, adalah kuasa Pemerintah yang saat ini sedang berkuasa. Gerindra melalui berbagai saluran kenegaraan mengingatkan bahwa sistim ekonomi Indonesia rapuh. Tanpa strategi yang tepat, dikarenakan sumber energi BBM bangsa ini menipis, dan tren harga BBM dunia yang terus naik, beban subsidi BBM pada ekonomi dapat menjadi sangat berat. (Prabowo Subianto, 2013: 1)

Sistim kenegaraan yang dianut sekarang mengakibatkan kekayaan nasional Indonesia yang kaya-raya dan melimpah mengalir keluar negeri. Untuk itu, Gerindra menganjurkan suatu strategi yang dinamakan oleh Prabowo dengan strategi dorongan besar. Strategi untuk membuka lahan-lahan produksi untuk tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan bioethanol atau bahan bakar nabati (BBN) yakni singkong, aren, tebu, jagung, kemiri dan lain sebagainya.

Strategi ini telah berhasil dilaksanakan dengan sukses oleh negara-negara lain. Brazil adalah contoh yang paling berhasil. Sudah hampir, atau mungkin sekarang sudah lebih dari setengah dari kebutuhan BBM Brazil dipenuhi dari bioethanol. Karena itu, saat ini ekonomi Brazil dapat kuat dan rakyatnya hidup dengan baik.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) melalui lembaga parlemen di gedung senayan DPR, memperjuangkan menjadikan anggaran lebih dihemat oleh Pemerintah dari konsekuensinya mengambil keputusan untuk mengurangi subsidi BBM.

Sejak pasal 8 ayat (10) UU APBN 2013 disahkan pada tahun 2012 yang lalu, pemerintah mendapatkan kewenangan yang tidak dapat dihalangi oleh lembaga parlemen untuk menaikkan BBM setiap saat sepanjang tahun 2013. Keputusan untuk meningkatkan atau menurunkan harga BBM berada di wilayah eksekutif, bukan legislatif.

Berikut ini sampaikan hal-hal yang Gerindra perjuangkan di DPR agar keputusan Pemerintah tidak terlalu membebani rakyat banyak.

Pertama, walaupun Partai Gerindra hanya memiliki 26 kursi, ia harus perjuangkan anggaran untuk membuka lahan produktif untuk memproduksi pangan dan bioethanol. Untuk itu, pemerintah membutuhkan investasi kurang lebih 5.000 dolar untuk satu hektar. Berdasarkan perhitungan Gerindra, jika Pemerintah berani menghapus subsidi BBM, akan membuka kemampuan untuk memberikan subsidi langsung hampir 300 triliun rupiah. Jika dari angka 300 triliun rupiah ini digunakan 100 triliun rupiah, atau 10 milyar dolar saja untuk mencetak lahan produktif - berarti bangsa Indonesia bisa mencetak dua juta hektar lahan produktif. Jika keseluruhan dari dua juta hektar lahan produktif ini ditanami singkong, bangsa ini bisa menghasilkan 125 juta barel bioethanol setiap tahun. Jumlah ini sudah 25 persen dari kebutuhan BBM nasional. Dengan teknologi yang tepat, Gerindra yakin bisa meningkatkan produksi sampai memenuhi 50 persen kebutuhan nasional. Dengan mencetak lagi lahan produktif, kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan BBM nasional dari singkong. Juga dengan dua juta hektar lahan produktif baru, dari hulu sampai hilir kita bisa membuka lapangan kerja untuk delapan sampai 12 juta orang bekerja.

Kedua, dana yang dihemat oleh Pemerintah harus segera dimanfaatkan secerdas mungkin, setepat mungkin. Antara lain untuk: 1) Menciptakan lahan-lahan produktif 2) Membangun infrastruktur; 3) Membantu rakyat yang paling miskin dengan subsidi langsung terarah seperti membangun dan membebaskan biaya transportasi umum bagi mereka yang membutuhkan; 4) Harus menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif dan bisa memberi penghidupan yang layak. Karena prinsip Partai Gerindra adalah tidak sekedar membantu tetapi untuk menghilangkan kemiskinan dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan. Maka Partai Gerindra semaksimal mungkin memperjuangkan agar dana yang dihemat oleh Pemerintah harusnya gunakan untuk: Melindungi rakyat yang paling miskin dari beban yang terlalu berat; Meningkatkan produktifitas bangsa di bidang pangan dan energi sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama kita kita dapat swasembada pangan dan swasembada energi.

Pada pertemuan Prabowo, selaku Dewan Pembina Gerindra, dengan Presiden SBY bulan Maret 2013, ia juga menyarankan agar: Bulog diperkuat, PT Pertani diperkuat, serta diciptakan gerai-gerai untuk menyalurkan subsidi langsung kepada rakyat miskin berupa sembako. Ia juga telah menyampaikan dalam beberapa forum, bahwa koperasi unit desa harus diberdayakan. Distribusi pupuk bersubsidi harus melalui KUD-KUD di seluruh kecamatan di Indonesia harus efektif. Kita juga harus pastikan barang-barang bersubsidi tidak boleh diperdagangkan. (Budi Sucahyo, 2013 : 6)

Partai Gerindra memberi peringatan kepada pemerintah tentang haluan bangsa Indonesia yang harus kembali pada UUD 1945 yang di sahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 bukan UUD hasil revisi seperti saat ini. Dalam hal haluan ekonomi misalnya, maka Pasal 33, UUD 1945 yang menjadi panduannya, begitupun dengan hal-hal lainnya. Gerindra pun berupaya Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (DPP Partai Gerindra, 2009 dan 2013 : 12 dan 11)

Dalam ranah state, Gerindra berjuang memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Gerindra bercita menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerindra pun berupaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, hukum, dan keadilan; Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarahkan pada kedaulatan dan kemandirian bangsa. (Hashim Djojohadikusumo, 2011: 1)

Selain itu Gerindra berupaya Mendorong pembangunan nasional yang menitik beratkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemerataan hasil-hasil

pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan mengurangi ketergantungan kepada pihak asing; Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat; Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan praduga tak bersalah dan persamaan hak di depan hukum; Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusi melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden untuk menciptakan lapisan Kepemimpinan nasional yang kuat.

MARKET SPHERE

Dengan lolos sebagai peserta Pemilu 2014, Partai Gerindra telah melewati satu tahap maraton untuk meraih cita-cita besar, yakni melakukan perubahan. Partai Gerindra mempunyai visi mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karenanya, dalam ranah ekonomi, Gerindra menginginkan pemerataan ekonomi, bukan pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati segelintir orang. Inilah yang Gerindra ingin wujudkan. Perekonomian Indonesia kembali ke ruh Pancasila dan UUD 1945, terutama Pasal 33. Ideologi bangsa mengamankan bahwa sumber daya ekonomi digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. (DPP Partai Gerindra, 2009 dan 2013 : 19-20 dan 24)

Bagi Gerindra, kemakmuran bumi pertiwi dikeruk habis oleh bangsa asing, rakyat hanya kebagian sisanya belaka. Perekonomian bangsa Indonesia penuh dengan paradoks. Indonesia adalah negara kaya dengan sumber daya alam melimpah tapi penduduknya miskin. Indonesia adalah negara agraris tapi pangannya harus diimpor. Indonesia adalah negara kepulauan dan merupakan salah satu negara dengan pantai terpanjang di dunia. Tapi nyatanya Indonesia mengimpor ikan dan garam. Banyak lagi paradoks lain yang bisa dijejerkan satu persatu. (Amran Nasution, 2013 : 3)

Intinya, Negara Indonesia yang pernah dijajah Belanda ratusan tahun itu sudah terbiasa tergantung kepada asing. Maka di dalam "Kembalikan Indonesia," Prabowo memberi jalan keluar dari segala macam paradoks itu dengan keberanian segenap jajaran bangsa untuk

mandiri. Indonesia tak boleh tergantung pada bantuan asing tapi harus menuju ke arah kemandirian ekonomi nasional.

Indonesia adalah pemakan beras terbesar di dunia. Setiap tahun harus mengimpor beras dalam jumlah besar. Maka Prabowo menegaskan Indonesia harus swasembada pangan. apalagi upaya untuk menjadi negeri berswasembada pangan itu sekaligus akan memberikan kesempatan kerja kepada para petani. Kata kuncinya dalam hal ini adalah kemandirian. Sebagai negeri yang ratusan tahun terjajah, memang melaksanakan kemandirian itu bukan sesuatu yang mudah.

Presiden Indonesia pertama Soekarno dulu pernah memperkenalkan gagasan "Berdikari" (berdiri di atas kaki sendiri). Bung Hatta dengan gagasan Koperasi-nya. Tapi seperti sama kita ketahui dari sejarah, gagasan besar Bung Karno dan Bung Hatta itu hanya tinggal gagasan yang tak pernah berhasil direalisasikan. Memang gagasan kemandirian Prabowo itu tak sama dengan "Berdikari" dan Koperasi Bung Karno-Hatta, yang belakangan diikuti dengan keluarnya Indonesia dari PBB. Di dalam buku Prabowo berikutnya, "Membangun Kembali Indonesia Raya" yang diterbitkan pada 2009, Prabowo memperjelas gagasannya dengan menyampaikan program prioritas membangun kedaulatan pangan, membangun kedaulatan energi, dan mengembangkan industri unggul. Sangat jelas gagasan ini jauh dari arti mengisolasi diri dari dunia internasional. Dengan kata lain, gagasan Prabowo sebenarnya lebih realistis. (Prabowo Subianto, 2009 : t.h)

Sebagai negara pertanian dengan 60% penduduknya hidup di sektor pertanian, adalah wajar kalau Indonesia menjadi negara berswasembada pangan. Negeri ini penghasil beras, jagung, dan beragam biji-bijian. Selain itu, perut bumi dan lautan Indonesia potensial sebagai penghasil minyak bumi. Selain alam Indonesia kaya dengan berbagai jenis tumbuhan yang bisa diolah sebagai substitusi bahan bakar minyak. (Amran Nasution, 2013 : 3)

Hanya saja sayangnya perut bumi yang menjadi penghasil energi itu diserahkan kepada perusahaan asing seperti Caltex, Total, Exxon Mobile, dan semacamnya. Dengan demikian dalam bidang energi, Indonesia tergantung kepada perusahaan asing. Itulah yang berten-

tangan dengan cita Gerindra untuk membangun kedaulatan energi. Potensi negara di bidang pangan dan energi harus ditangani sendiri.

Gerindra sangat sadar betapa vitalnya pangan dan energi, apalagi ketika terjadi konflik. Sekali pun memiliki persenjataan canggih, sebuah negara akan bertekuk-lutut bila tak memiliki pangan dan energi.

Masalahnya: bagaimana gagasan tentang kemandirian itu bisa direalisasikan? Jawabannya jelas, dibutuhkan kekuasaan. Tanpa kekuasaan (*power*) tak mungkin gagasan besar seperti itu bisa dilaksanakan.

Pemerintahan Presiden SBY yang dalam 2 periode menguasai Indonesia, misalnya, jelas tak mendukung gagasan tentang kemandirian pangan mau pun energi. Terbukti, pemerintahan SBY sangat bersemangat mengimpor beras, sekaligus kurang peduli nasib petani. Pencetakan sawah baru hampir tak ada, pembangunan jaringan irigasi sangat langka. Sedangkan industri energi negara betul-betul diserahkan kepada perusahaan-perusahaan minyak asing. Oleh karena itu, pada 2008, muncul ide mendirikan partai. Dari situ berdirilah Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), yang sekarang memasuki usia 6 tahun. Partai ini diharapkan akan merealisasikan gagasan Prabowo Subianto tentang kemandirian ekonomi Indonesia di bidang pangan dan energi.

Memang semua itu bukan soal gampang. Dalam Pemilu legislatif 2009, misalnya, Gerindra yang baru didirikan setahun sebelumnya, hanya meraih 26 kursi DPR (tak sampai 5%). Dengan perolehan itu, adalah mustahil Gerindra bisa memperjuangkan gagasannya ekonomi tadi di lembaga legislatif. Harapan sekarang digantungkan pada Pemilu 2014. Diharapkan Partai Gerindra akan berhasil mengerek perolehan kursinya secara signifikan. Selain itu, diharapkan Prabowo Subianto akan terpilih sebagai Presiden RI.

Jaringan network Prabowo di kawasan Teluk Persia dan Timur Tengah diperkirakan lebih luas. Prabowo juga dinilai lebih berwibawa, lebih tegas dan pro rakyat. Kelebihan lainnya dari Prabowo adalah masih dipandang mempunyai pendukung dikalangan Golkar dan mempunyai peluang memggerus pendukung PDIP di pedesaan.

Secara garis besar partai Gerindra menawarkan sebuah kemandirian bangsa, bila terkait dengan ketahanan pangan dan energi. Hal ini secara terus menerus diusung oleh Gerindra dan tidak ada partai yang menyainginya, maka hal ini akan melekat pada pengusungnya. Awareness yang melekat di masyarakat adalah isu kemandirian bangsa sudah menjadi image dari partai Gerindra. Positioning ini menjadi penting karena untuk membedakan partai satu dengan partai lainnya.

Menurut survei yang dilakukan Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) pada April 2009 menunjukkan citra sebagai partainya wong cilik yang selama ini melekat di PDIP mulai bergeser. Partai Gerindra, berkat iklan politiknya yang sangat luar biasa, sukses membangun image sebagai partai yang paling memperjuangkan petani 26,8 % dan nelayan 26,7 %. Hasil survei ini menunjukkan bahwa image yang dimiliki oleh partai Gerindra masih tinggi di benak masyarakat.

Oleh karena itu hal ini partai politik Gerindra di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat, bukan hanya dapat memajemen organisasinya tetapi juga dapat merancang atau mengatur strategi positioning dalam organisasinya sehingga dapat membuat pemilih untuk tetap setia dan konsisten pada organisasinya. Selain itu juga untuk meningkatkan jumlah penjualan produknya melalui pemilihan, agar dapat terus bertahan dan berkembang dalam dunia politik.

KESIMPULAN

Mengutip kata-kata politisi Inggris abad kedelapan belas, Edmund Burke: *“The only thing necessary for the triumph [of evil] is for good men to do nothing.”* Dalam terjemahan bebasnya, “kalau orang baik-baik tidak berbuat apa-apa, maka para penjahat yang akan bertindak.” terinspirasi oleh kata-kata tersebut, Gerindra terbentuk sebagai sebuah partai baru yang memberikan haluan baru dan harapan baru. Tujuannya tidak lain, agar negara ini bisa diperintah oleh manusia yang memerhatikan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan golongannya saja. Sementara kondisi yang sedang berjalan, justru memaksakan demokrasi di tengah himpitan kemiskinan, yang hanya berujung pada kekacauan.

Pembentukan Partai Gerindra dideklarasikan berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum, yakni pada 6 Februari 2008. Dalam deklarasi itu, termaktub visi, misi dan manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Bagi Gerindra, budaya bangsa dan wawasan kebangsaan harus menjadi modal utama untuk mengeratkan persatuan dan kesatuan. Sehingga perbedaan justru menjadi rahmat dan menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Namun demikian mayoritas rakyat masih berkubang dalam penderitaan, sistem politik tidak mampu merumuskan dan melaksanakan perekonomian nasional untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas bangsa Indonesia dari kemelaratan. Bahkan dalam upaya membangun bangsa, Indonesia terjebak dalam sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar telah memporak-porandakan perekonomian bangsa, yang menyebabkan situasi yang sulit bagi kehidupan rakyat dan bangsa. Hal itu berakibat menggelembungnya jumlah rakyat yang miskin dan menganggur. Pada situasi demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia ini kecuali harus menciptakan suasana kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan. Nah, Partai Gerindra terpanggil untuk memberikan pengabdianya bagi bangsa dan negara dan bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ancarî, ‘Abd al-Şamîd Ismaîl. *al-Shûrâ wa atharuha fî al-Dimaqrâmiyya* (Qahîrâ: al-Mamba’ah al-Salâfiyah, 1980).
- Azra, Azyumardi. *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat* (Jakarta: Kompas, 2002).
- _____. “Civil Society and Democratization in Indonesia: The Transition Under President Wahid and Beyond,” dalam David C. Shack dan Wayne Hudson, *Civil Society In Asia (Law, Ethic and Governance)* (Hampshire, Inggris dan Burlington, USA: Ashgate Publishing Company, 2003).

- _____. "Oposisi Cak Nur: Oposisi Soliter," dalam Sukandi A.K., (ed.), *Prof. Dr. Nurcholis Madjid Jejak Pemikir dari Pembaharu sampai Guru Bangsa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- _____. *Malam Seribu Bulan: Renungan-renungan 30 Hari Ramadan* (Jakarta: Erlangga, 2005).
- _____. "Politik Lokal dan Pembelajaran Politik," dalam Andy Ramses M dan La Bakry (ed.), *Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: MIPI, 2009).
- Bakti, Andi Faisal. "Press Potrayyal of Civil Society in Southeast Asia," dalam Helen Lansdowne, Philip Dearden dan William Nielson (ed.) *Communities in Southeast Asia Part IV (Governance and Civil Society)* (Victoria, Canada: Center for Asia Pacific Initiatives, 2000).
- _____. "Majelis Azzikra New Approach to Dakwah for Civil Society in Indonesia," dalam *Mimbar Agama dan Budaya*, Vol. 23, No. 1, (2006)
- _____, dkk. *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi* (Ciputat: Churia, 2012).
- _____, "At-Thahiriyah and its Engagement in Civil Society: The Case of Dakwah Activities," www.andifaisalbakti.com.
- _____, "As-Syafi'iyah Engagement in Dakwah and The Development of BKMT for Civil Society in Indonesia," www.andifaisalbakti.com.
- _____, "Islam in Cambodia: cham religious learning groups and Their Contribution to Civil Society," www.andifaisalbakti.com.
- _____, "Communication and Dakwah: Religious Learning Group and Their Role in the Protection of Islamic Human Security and Rights for Indonesian Civil Society" dalam Wayne Nelles (ed.), *Comparative Education, Terrorism, and Human Security; From Critical Pedagogy to Peacebuilding* (New York, United States: Palgrave Macmillan, 2003)
- _____, "Darut Tauhid: New Approach to Dakwah for Peace in Indonesia" dalam *Dakwah; Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi*, Volume VIII No. 1 Juni (2006).
- _____, "Good Governance dalam Islam: Gagasan dan Pengalaman," dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Islam, Negara dan Civil Society; Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 2005).
- _____, "Communication and Violence: Communicating Human Factor Characteristics is Necessary for Horizontal Conflict Resolution in Indonesia," dalam *Identity, Culture, and Politics* Vol. 9, No. 1 (July 2008).

- _____, “Nurcholish Madjid and the Paramadina Foundation,” dalam *IIAS Newsletter*, 34, July (2004), 22;
- _____, “Islam and Modernity; Nurcholish Madjid’s Interpretation of Civil Society, Pluralism, Secularization, and Democracy,” dalam *Asian Journal of Social Science*, Volume 33, Brill-Leiden, Number 3, (2005), 489.
- _____, “Islamic Communication in the Philippines: How do Muslims Contribute to Civil Society in Mindanao?,” dalam *makalah* Orientation and Country Workshop of API Fellowships, Cooperation between Nippon Foundation and Research Center for Regional Resources-LIPI, Jakarta, March 23-24, (2010).
- _____, “Majelis Azzikra: New Approach to Dakwah for Civil Society in Indonesia,” dalam *Mimbar Agama dan Budaya*, Vol 23, No. 1, (2006).
- _____, “Islamic Religious Learning Groups and Civil Society: How Do Muslims Contribute to Civil Society in Japan and The Philippines?,” *The 8th Asian Public Intellectuals Fellowship (API)*. Japan: Nippon Foundation, (2008).
- _____, “Understanding How Communication Works: The Key to Good Governance for Development in Indonesia”, dalam Andi Faisal Bakti (ed), *Good Governance & Conflict Resolution in Indonesia; From Authoritarian Government to Civil Society* (Jakarta: Logos, 2009).
- _____, “Dakwah Dalam Komunikasi, dalam *Republika*,
- _____, Islamic Dawah in Southeast Asia; www.andifaisalbakti.com.
- _____, “Sumbangan Ilmu-Ilmu Keislaman Terhadap Pembangunan Nasional: Perspektif Ilmu Dakwah,” Makalah disampaikan di *Seminar Nasional*, Progam Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara, 17 Desember (2011).
- _____, “The Contribution of Dakwah To Communication Studies: Risale-I Nur Collection Perspective,” Paper Presented at *International Badiuzzaman Symposium on: Knowledge, Faith, and Morality and the Future of Humanity*, Organized by the Istanbul Foundation for Science and Culture at Wow Hotel, (2010).
- Bruinessen, Martin van. “Post-Suharto Muslim engagements with civil society and democracy”, makalah yang dipresentasikan pada *Third International Conference and Workshop “Indonesia in Transition”*, organised by the KNAW and Labsosio, Universitas Indonesia, August 24-28, Universitas Indonesia, Depok (2003).
- Chadwick H, Bruce. *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*. (Semarang: IKIP Press, 1983.).

- Chadhoke, Neera. *Benturan Negara dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta, ISTAWA, 2001).
- Chadhoke, Neera. "The Civil and the Political in Civil Society," dalam C.M. Elliot (ed.), *Civil Society and Democracy: a Reader* (Oxford: Oxford University Press, 2003).
- Djojohadikusumo, Hashim, "Gerindra Membela dan Melestarikan Pancasila," dalam *Gema Indonesia Raya*, Edisi 7/Tahun 1/November, (2011).
- Effendy, Bahtiar. "Wawasan al-Qur'an tentang Masyarakat Madani: Menuntutnya Negara-Bangsa yang Moderat," dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Vol. 1, No. 2, (1999).
- Fish, M. Steve. "Islam and Authoritarianism," dalam *World Politics*, Volume 55, Number 1, Oktober (2002).
- Gerindra. *Manifesto Perjuangan Partai Gerindra* (Jakarta: Gerindra, 2013).
- _____, "Susunan Dewan Pengurus Pusat," www.partaigerindra.or.id, diakses tanggal 12 Oktober 2013.
- _____, *Tanya Jawab Seputar Partai Gerindra: Gerakan Indonesia Raya* (Jakarta: Bakom-DPP Gerindra, 2009).
- Hadiwata, Bob "Civil Society: Pembangu dan Sekaligus Perusak Demokrasi," dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 9, Nomor 1, Juli (2005).
- Hamayotsu, Kikue. "Bribe and Clientelism and Institutional Backlash: The Rise and Fall of Religious Parties in Indonesia's Electoral Democracy," dalam Dirk Tomsa dan Andreas Uff (ed.), *Party Politics in Southeast Asia: Clientelism and Electoral Competition in Indonesia, Thailand, and Philippines* (New York: Routledge, 2013).
- Hikam, M. AS. "Wacana Intelektual tentang Civil Society di Indonesia," dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Vol. 1, No. 2, (1999).
- Ibrahim, Faisal. "Perkembangan Civil Society Di Negara-Negara Arab (Proses Demokratisasi Di Mesir, Suriah dan Kuwait), *Disertasi*, Program Politik dan Hubungan Internasional di Timur Tengah UI, (2007).
- Ibrahîm, Zakaria 'Abd al-Mu'îm. *Ni'âm al-Shûrâ fî al-Islâm wa Ni'âm al-Dimaqrâmiyyah al-Mu'acirâh* (Qahîrâ: Ttp., 1985).
- Lampiran Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/ Tahun 2003 dan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik KPU Nomor: 5/BA/I/2003.
- LSI. *Mencari Capres 2014, Pengetahuan, Sikap, Tindakan Elektoral Calon Pemilih*, (Jakarta: LSI, 2012).

- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. "Universalisme Nilai-nilai Politik Islam Menuju Masyarakat Madani," dalam *Profetika* Vol. 1. No. 2. Jakarta, (1999).
- Madjid, Nurcholis. *Membangun Oposisi Menjaga Momentum Demokratisasi*, (Jakarta, Voice Center Indonesia, 2000).
- _____. *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999).
- Marx, Karl dan Frederick Engels. *Manifesto of the Communist Party February 1848* (terj.) Samuel Moore (Moscow: Marxists Internet Archive (marxists.org), 2010).
- Mujani, Saiful dan R. William Liddle. "Personalities, parties, and voters," dalam *Journal of Democracy*, Volume 21, Number 2 April (2010).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab - Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Munhanif, Ali, "M. Steven Fish: "Islam dan Otoritarianisme," dalam *Review paper Yayasan Abad Demokrasi*, Edisi 030, Oktober (2011).
- Nasution, Amran, "Kalau Prabowo Jadi Presiden," dalam *Gema Indonesia Raya*, Edisi 22/Tahun III/Februari, (2013).
- Qar
awî, Yusûf. *Fiqh al-Daulah fî al-Islâm* (Qahira, Dâr al-burûq, 2005).
- Rahardjo, M. Dawam. "Masyarakat Madani di Indonesia: Sebuah Penjajakan Awal," dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Vol. 1, No. 2, (1999).
- Schumann, Olaf. "Dilema Islam Kontemporer: Antara Masyarakat Madani dan Negara Islam," dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Vol. 1, No. 2, (1999).
- Subianto, Prabowo, "Gerindra Berjuang untuk Masa Depan Indonesia," dalam *Gema Indonesia Raya*, Edisi 10/Tahun II/Februari, (2012).
- _____, "Kita Harus Merebut Hati Rakyat," dalam *Gema Indonesia Raya*, Edisi 14/Tahun II/Juni, (2012).
- _____, "Pemilu 2014 adalah Momentum Kita," dalam *Gema Indonesia Raya*, Edisi 24/Tahun III/April, (2013).
- _____, "Perubahan Dimulai Dari Pemimpin yang Amanah," dalam *Gema Indonesia Raya*, Edisi 19/Tahun II/November, (2012).
- _____, "Saya Siap Menjadi Pelayan Rakyat ...," dalam *Gema Indonesia Raya*, Edisi 22/Tahun III/Februari, (2013).
- _____, *Membangun Kembali Indonesia Raya* (Jakarta: Gerindra, 2009).
- Sucahyo, Budi, "Prabowo Subianto: Saya Ingin Menjadi *Successor SBY*," dalam *Gema Indonesia Raya*, Edisi 24/Tahun III/April, (2013).

Weiss, Meredith L. "Civil Society and Political Reform in Malaysia," dalam David C. Shack dan Wayne Hudson, *Civil Society In Asia (Law, Ethic and Governance)* (Hampshire, Inggris dan Burlington, USA: Ashgate Publishing Company, 2003).